

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

*“Global wealth inequalities are even more pronounced than income inequalities. The poorest half of the global population barely owns any wealth at all, possessing just 2% of the total. In contrast, the richest 10% of the global population own 76% of all wealth.” (World Inequality Report tahun 2022)*

Ketimpangan ekonomi merupakan salah satu isu global yang terus menjadi perhatian utama dalam berbagai diskusi akademis dan kebijakan publik. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara maju, meskipun dengan tingkat dan dinamika yang berbeda. Ketimpangan ekonomi merujuk pada kesenjangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Menurut data dari *World Inequality Report 2022*, 10% populasi terkaya di dunia menguasai sekitar 76% total kekayaan global, sementara 50% populasi termiskin hanya memiliki kurang dari 2%.<sup>1</sup>

Pentingnya membahas isu ketimpangan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari dampaknya yang luas terhadap stabilitas sosial, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan yang tinggi dapat memicu konflik sosial, mengurangi kohesi masyarakat, dan menghambat mobilitas sosial. Studi oleh Ostry menunjukkan bahwa ketimpangan yang tinggi berkorelasi negatif dengan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Hal ini terjadi karena ketimpangan mengurangi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi, yang pada akhirnya menghambat produktivitas dan inovasi.<sup>2</sup> Oleh karena itu, memahami akar masalah dan solusi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi menjadi sangat krusial.

Pembangunan ekonomi merupakan isu krusial yang memengaruhi distribusi pendapatan dan keamanan di suatu wilayah. Rasio Gini, sebuah konsep yang

---

<sup>1</sup> Lucas Chancel, et al., *World Inequality Report 2022*. (World Inequality Lab. 2022), 3

<sup>2</sup> Jonathan Ostry et al., “*Redistribution, Inequality, and Growth*,” (Staff Discussion Notes 14, no. 02 2014), 15.

diperkenalkan oleh Corrado Gini, merupakan indikator yang paling banyak digunakan untuk memprediksi pertumbuhan. Gini Ratio memiliki rentang nilai antara 0 hingga 1, di mana nilai 0 menunjukkan pemerataan sempurna (setiap individu memiliki pendapatan yang sama) dan nilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna (seluruh pendapatan terkonsentrasi pada satu individu atau kelompok). Semakin tinggi nilai Gini Ratio, semakin besar ketimpangan yang terjadi di suatu wilayah. Dalam konteks ekonomi makro, ketimpangan yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, memperburuk mobilitas sosial, dan meningkatkan risiko ketidakstabilan sosial.<sup>3</sup>

Membahas ketimpangan ekonomi juga relevan dalam konteks pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Tujuan ke-10 SDGs secara khusus menekankan pentingnya mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara. Dengan demikian, membahas isu ketimpangan ekonomi tidak hanya penting dari perspektif akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi pembangunan nasional dan global.

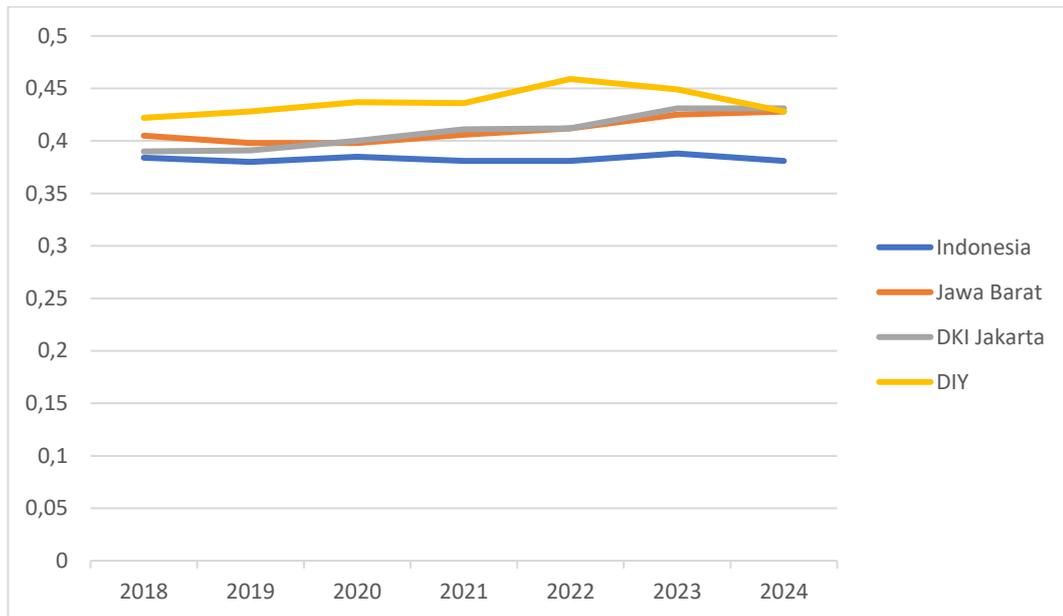
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa indeks Gini ratio Indonesia pada tahun 2024 berada pada angka 0,381, yang mengindikasikan tingkat ketimpangan yang cukup tinggi.<sup>4</sup> Ketimpangan ini tidak hanya terlihat antara kelompok kaya dan miskin, tetapi juga antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara Jawa dan luar Jawa. Kondisi ini diperparah oleh ketidakmerataan akses terhadap infrastruktur, pendidikan, dan lapangan kerja.

Berdasarkan data BPS, dari 38 Provinsi per 2024 Provinsi Jawa Barat menempati posisi tiga besar dalam kurun waktu lima tahun terakhir dan puncaknya pada tahun 2024 menjadi peringkat dengan tingkat ketimpangan kedua tertinggi di Indonesia. Berikut di bawah ini data grafik yang menggambarkan 3 provinsi dengan Gini ratio tertinggi selama 7 tahun terakhir:

---

<sup>3</sup> M. Afdhal Chatra P et al., *Pengantar Ekonomi Pembangunan : Teori dan Konsep Pembangunan Ekonomi Era Industri 4.0 & Society 5.0* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 59.

<sup>4</sup> “Gini Ratio Menurut Provinsi Dan Daerah - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia,” accessed February 10, 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTgjMg==/gini-ratio-menurut-provinsi-dan-daerah.html>.



Sumber: Data BPS, diolah peneliti (2025)

**Gambar 1.1**  
**Grafik Tingkat Gini ratio 3 provinsi tertinggi dan Nasional tahun**  
**2018-2024**

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa dalam kurun waktu 2018 hingga 2024, tingkat ketimpangan ekonomi di Indonesia, menunjukkan tren yang relatif stabil di angka 0,38 - 0,40. Hal ini mencerminkan bahwa secara nasional, kesenjangan pendapatan di Indonesia tidak mengalami perubahan yang signifikan, meskipun ada berbagai upaya pemerintah. Namun, angka ini masih mengindikasikan adanya ketimpangan yang perlu diperhatikan, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat ketimpangan yang lebih tinggi. Beberapa provinsi seperti DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Jawa Barat secara konsisten mencatatkan angka Gini Ratio yang lebih tinggi dari rata-rata nasional, menunjukkan bahwa disparitas ekonomi lebih terasa di daerah perkotaan dan wilayah dengan aktivitas ekonomi yang lebih kompleks.

Jawa Barat menjadi salah satu daerah dengan tingkat ketimpangan ekonomi yang cukup tinggi, dengan Gini Ratio berkisar antara 0,39 - 0,43 dalam periode 2018-2024. Angka ini sejalan dengan provinsi perkotaan lainnya seperti DKI

Jakarta dan DI Yogyakarta, yang juga memiliki angka Gini Ratio di atas rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Jawa Barat memiliki tingkat ekonomi yang besar, ketimpangan antara kelompok masyarakat tetap menjadi tantangan utama yang perlu diatasi melalui kebijakan inklusif dan pemerataan pembangunan, terutama di wilayah perkotaan dan perbatasan daerah industri.

Dalam perspektif Islam, ketimpangan ekonomi bukan sekadar fenomena ekonomi, tetapi juga merupakan isu keadilan sosial yang harus ditangani dengan mekanisme yang telah ditetapkan dalam syariat. Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil agar tidak hanya berputar di kalangan tertentu saja, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hasyr (59:7):

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ  
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “*Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.*” (QS. Al-Hasyr: 7)

Berdasarkan ayat tersebut, Islam menganjurkan distribusi kekayaan, termasuk distribusi kepada seluruh anggota masyarakat, alih-alih memusatkannya hanya pada orang kaya. Selain mencapai distribusi kekayaan yang merata kepada masyarakat, Islam menekankan pentingnya memberikan rasa aman kepada masyarakat melalui pembayaran zakat, pengumpulan infak, serta keberadaan hukum perang, wasiat, dan hibah. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya keresahan bahkan pada golongan terkecil sekalipun. Hal

ini juga memastikan tidak adanya monopoli dan distribusi kekayaan tidak terhambat, serta adanya kerangka moral yang jelas dalam pembelian barang.<sup>5</sup>

Lebih jauh, ekonomi Islam juga menekankan peran negara dalam menjamin kesejahteraan kolektif melalui intervensi sosial. Fungsi negara tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelayan publik (*khadim al-ummah*) yang wajib mengalokasikan sumber daya untuk kepentingan kelompok lemah. Salah satu bentuk peran ini adalah belanja sosial yang bersumber dari APBN/APBD, yang dalam sistem ekonomi Islam sejatinya bertindak seperti *bayt al-mal* modern. Intervensi sosial yang proporsional tidak hanya mencerminkan nilai keadilan distributif, tetapi juga menunjukkan keterlibatan aktif negara dalam menjaga keseimbangan ekonomi antarwilayah dan antarindividu. Dengan demikian, pendekatan ekonomi Islam menyediakan kerangka normatif sekaligus operasional dalam menjawab tantangan ketimpangan ekonomi di daerah seperti Jawa Barat.

Teori Redistribusi menyatakan bahwa instrumen fiskal seperti pajak dan transfer sosial dapat menurunkan ketimpangan.<sup>6</sup> Dalam konteks kontemporer, Monzer Kahf, berpendapat bahwa zakat adalah instrumen fiskal Islam yang dapat digunakan sebagai mekanisme redistribusi pendapatan untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong pembangunan ekonomi berbasis keadilan sosial.<sup>7</sup>

Secara logis, zakat dapat berfungsi sebagai instrumen pengurang ketimpangan ekonomi karena mekanisme dasarnya adalah redistribusi kekayaan dari kelompok mampu kepada kelompok rentan. Ketika zakat disalurkan secara efektif dan tepat sasaran, ia mampu meningkatkan daya beli kelompok mustahik, mengurangi ketimpangan konsumsi, dan mempersempit kesenjangan sosial. Zakat yang produktif juga dapat mendorong kemandirian ekonomi melalui modal usaha mikro, pelatihan keterampilan, atau program pemberdayaan lainnya. Oleh karena itu, semakin optimal pengelolaan zakat di

---

<sup>5</sup> Safitri, *Analisis Pengaruh Penyaluran Zakat terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh Periode 2007-2017*, (Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah, Volume. 2, No. 2, 2018) 47

<sup>6</sup> Anthony Atkinson, *Inequality: What Can Be Done?*. (Harvard University Press, 2015)

<sup>7</sup> Monzer Kahf, *The Islamic Economy: An Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System*, (J. Res. Islamic Econ., Vol. 1, No. 2, 1984)83

tingkat daerah, semakin besar kontribusinya dalam menekan ketimpangan ekonomi antardaerah dan antarindividu.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa zakat berperan dalam mengurangi kemiskinan, tetapi dampaknya terhadap ketimpangan pendapatan belum banyak diteliti secara empiris. Patmawati menganalisis praktik zakat untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di negara bagian Selangor, Malaysia. Ia menemukan bahwa sekelompok 10 persen penduduk mendapatkan manfaat dari 10 persen kekayaan penduduk melalui zakat. Ketika transfer zakat tidak dilakukan, angka ini meningkat sebesar 0,4%. Lebih lanjut, 10 persen penduduk umum mendapatkan manfaat dari peningkatan pendapatan sebesar 32 persen, naik dari 35,97 persen pada posisi sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kohesi kelompok dapat ditingkatkan. Zakat diyakini berpotensi mengurangi jumlah keluarga miskin di Selangor, serta tingkat kemiskinan dan kejahatan.<sup>8</sup>

Penelitian lainnya Noor menemukan bahwa zakat berpengaruh signifikan terhadap pengurangan kemiskinan, tetapi belum diuji dampaknya terhadap ketimpangan pendapatan secara spesifik.<sup>9</sup> Selain itu, Safitri menemukan bahwa di Aceh, zakat berpengaruh terhadap ketimpangan, tetapi hasil ini mungkin tidak dapat digeneralisasi ke daerah lain seperti Jawa Barat.<sup>10</sup>

Menurut Data Puskas Baznas, Jawa Barat juga menjadi provinsi dengan tingkat potensi penghimpunan dan penyaluran dana Zakat tertinggi di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, secara nasional penghimpunan dan penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) selalu mengalami peningkatan. Berikut di bawah ini data penyaluran dana ZIS Nasional dan di Jawa Barat dari tahun 2018-2024:

---

<sup>8</sup> Firmansyah, *Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan*. (Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 21, No. 2, Desember 2013), 181

<sup>9</sup> Noor, Siti Sholehhatun. 2025. Analisis pengaruh penyaluran zakat Terhadap ketimpangan pendapatan di indonesia (studi kasus tahun 2013-2022). UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

<sup>10</sup> Safitri, Analisis Pengaruh Penyaluran Zakat terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh Periode 2007-2017, (Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah, Volume. 2, No. 2, 2018) 47

**Tabel 1.1**  
**Data Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Nasional dan**  
**Jawa Barat Tahun 2018-2024**

<b>Tahun</b>	<b>Penyaluran Dana ZIS Nasional (Rp)</b>	<b>Penyaluran Dana ZIS Jawa Barat (Rp)</b>
2024	39,482,123,464,406	1.275.510.418.151
2023	31,199,428,031,786	980.671.728.897
2022	21,685,902,998,533	953.278.555.612
2021	14,043,737,614,114	1.139.931.714.555
2020	11,964,143,524,220	431.995.094.173
2019	8,580,974,739,448	749.286.415.429
2018	6,800,139,133,196	899.321.715.541

Sumber: Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Puskas BAZNAS (2025)

Berdasarkan data Tabel 1, terlihat selama periode 2018 hingga 2024, penyaluran dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) secara nasional menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Dari Rp 6,8 triliun pada tahun 2018, jumlah ini melonjak menjadi Rp 39,48 triliun pada tahun 2024. Lonjakan drastis ini menggambarkan kemajuan dalam pengelolaan zakat nasional, baik dari sisi penghimpunan maupun penyaluran. Faktor-faktor seperti meningkatnya literasi zakat, kemajuan teknologi digital dalam penghimpunan dana, serta kolaborasi antara lembaga pengelola zakat dan pemerintah turut mendorong capaian ini. Selain itu, meningkatnya kesadaran sosial masyarakat dalam mendukung program kesejahteraan umat juga berkontribusi besar terhadap tren positif ini.

Provinsi Jawa Barat turut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian nasional. Sejak 2018, penyaluran dana ZIS di Jawa Barat selalu berada di atas angka Rp 1 triliun, dengan capaian tertinggi sebesar Rp1,2 triliun pada tahun 2024. Namun, jika dilihat dari persentase terhadap total nasional, kontribusi Jawa Barat mengalami penurunan dari sekitar 16,6% pada 2018 menjadi hanya sekitar 3,4% pada 2024. Penurunan persentase ini bukan mencerminkan melemahnya peran Jawa Barat, melainkan menunjukkan bahwa wilayah-wilayah lain di Indonesia juga mengalami pertumbuhan signifikan dalam penyaluran dana ZIS, sehingga distribusi capaian zakat menjadi lebih merata di seluruh nusantara.

Meski secara proporsional kontribusi Jawa Barat menurun, provinsi ini tetap memegang peranan penting dalam peta zakat nasional. Dengan potensi penduduk muslim yang besar, basis ekonomi yang kuat, serta infrastruktur pengelolaan zakat yang relatif matang, Jawa Barat memiliki peran strategis dalam memperkuat ekosistem zakat nasional. Optimalisasi penghimpunan dan penyaluran yang lebih inovatif serta kolaboratif, termasuk pemanfaatan teknologi digital dan keterlibatan komunitas lokal, dapat semakin meningkatkan kontribusi Jawa Barat di masa mendatang. Jika sinergi antara pemerintah daerah, Baznas, dan masyarakat terus diperkuat, Jawa Barat dapat kembali menjadi salah satu motor utama dalam pencapaian target zakat nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Teori Kuznets Curve menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi, investasi dapat meningkatkan ketimpangan, tetapi dalam jangka panjang, ketimpangan akan menurun seiring dengan pemerataan distribusi kekayaan.<sup>11</sup> Teori ekonomi mendefinisikan investasi sebagai pembelian barang dan jasa dengan tujuan mengurangi dan, yang lebih penting, meningkatkan jumlah barang dan jasa yang diproduksi di masa mendatang. Menurut Sukirno, investasi merupakan komponen kedua yang menentukan output agregat. Namun, di banyak negara berkembang, investasi justru cenderung terkonsentrasi di sektor dan wilayah tertentu, sehingga memperlebar kesenjangan ekonomi.<sup>12</sup>

Secara logis, investasi diharapkan menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan sektor produktif, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, pengaruh investasi terhadap ketimpangan bisa ambigu. Jika investasi terkonsentrasi di wilayah maju atau hanya menguntungkan kelompok modal besar, maka ia justru memperluas kesenjangan. Sebaliknya, jika investasi tersebar ke daerah tertinggal dan diarahkan pada sektor padat karya, maka ia akan memperluas inklusi ekonomi dan memperkecil ketimpangan. Oleh karena

---

<sup>11</sup> Tripani, *Pengaruh PMA, DAU, Kesempatan Kerja dan PAD Terhadap Ketimpangan Pendapatan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Selatan*, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)

<sup>12</sup> Sukirno, S. (2018). *Ekonomi Pembangunan*. (Jakarta: Rajawali Pers)

itu, relevansi investasi terhadap ketimpangan sangat tergantung pada pemerataan akses, distribusi sektor, serta kemampuan daerah menyerap manfaat investasi tersebut.

Penelitian yang dilakukan Wijayanti dan Aisyah mengungkapkan bahwa investasi berdampak positif terhadap pertumbuhan pendapatan. Investasi positif mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan pendapatan karena, dalam perekonomian yang sedang berkembang, peningkatan pendapatan akan menghasilkan lebih banyak pendapatan, yang kemudian mengarah pada investasi. Sebaliknya, di wilayah lain yang pertumbuhannya pesat, permintaan dana untuk investasi tinggi karena rendahnya tingkat suku bunga dan pendapatan. Dengan perbedaan pertumbuhan ini dan persepsi bahwa investasi terbatas pada bidang tertentu, terdapat risiko penurunan pendapatan.<sup>13</sup>

Berikut di bawah ini data realisasi nilai Investasi dibanding target di Jawa Barat dari tahun 2018-2024:

**Tabel 1.2**  
**Realisasi Investasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2024**

Tahun	Realisasi Investasi (Triliyun Rupiah)
2024	261,14
2023	210,60
2022	174,58
2021	136,13
2020	120,42
2019	137,99
2018	116,97

Sumber: BKPM Provinsi Jawa Barat (2025)

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa realisasi investasi mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan selama periode 2018 hingga 2024. Pada tahun 2018, total investasi yang masuk tercatat sebesar Rp 116,97 triliun dan meningkat hampir dua kali lipat menjadi Rp 261,14 triliun pada tahun 2024. Lonjakan investasi paling tajam terjadi pada tahun 2024 dengan peningkatan sekitar 24% dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan yang konsisten ini

<sup>13</sup> Erni Sri Wijayanti dan Siti Aisyah, 2022. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Asing, Inflasi, dan Trade Openness terhadap Ketimpangan di Indonesia Tahun 2000-2020*. (Ekonomis: Journal of Economics and Business, 6(2), September 2022), 539

mencerminkan daya tarik Jawa Barat sebagai tujuan investasi, baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), yang didorong oleh infrastruktur yang berkembang, kebijakan pemerintah daerah yang pro-investasi, dan kedekatannya dengan pusat ekonomi nasional.

Meski investasi terus meningkat dari tahun ke tahun, pertumbuhan tersebut belum tentu serta-merta berdampak langsung pada penurunan ketimpangan ekonomi di wilayah ini. Hal ini bergantung pada seberapa merata distribusi investasi tersebut ke seluruh kabupaten/kota dan sektor-sektor produktif yang inklusif. Jika investasi hanya terkonsentrasi di daerah-daerah maju seperti Kota Bekasi, Bandung, dan Karawang, maka kesenjangan antara wilayah urban dan rural justru dapat semakin melebar.

Teori Becker yang lain menyatakan bahwa IPM berdampak negatif terhadap pertumbuhan karena seiring meningkatnya pendidikan formal, produktivitas di tempat kerja pun meningkat. Hal ini juga konsisten dengan teori modal manusia, yang menyatakan bahwa pendidikan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan pendapatan. Teori Pembangunan Manusia karya Amartya Sen menyatakan bahwa pendidikan dan kesehatan memiliki peran sentral dalam mengurangi kemiskinan.<sup>14</sup>

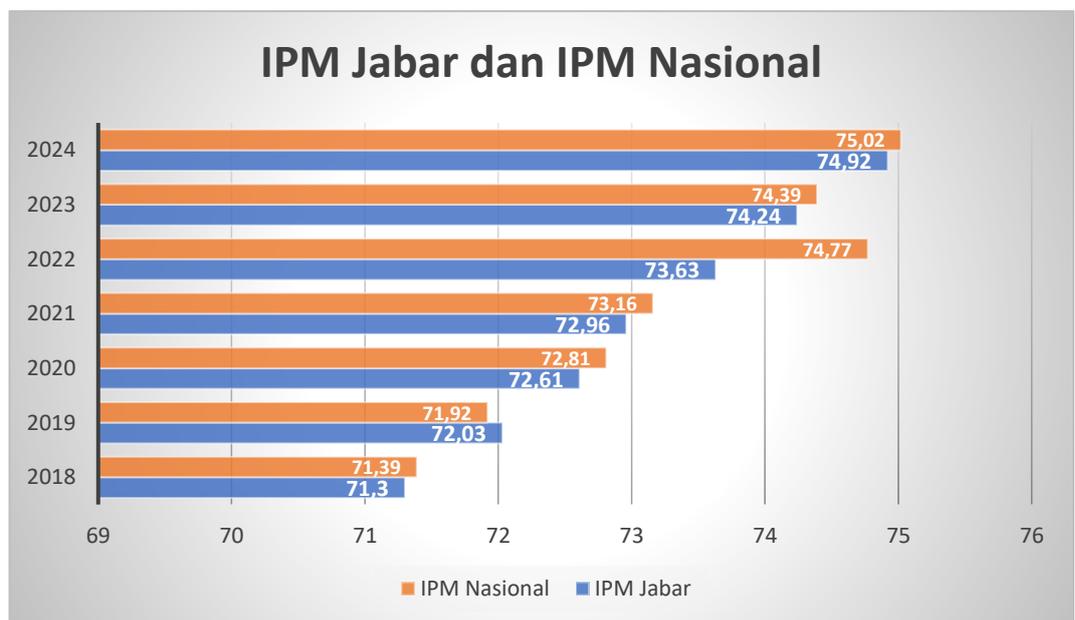
Secara logis, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat memperkecil ketimpangan karena memperluas peluang ekonomi masyarakat. Ketika pembangunan manusia berjalan merata di seluruh daerah, maka potensi kesenjangan sosial dan ekonomi pun berkurang. Oleh karena itu, IPM yang tinggi dan merata di berbagai kabupaten/kota dapat berfungsi sebagai penyeimbang distribusi ekonomi antarwilayah.

Lebih lanjut, Yoertiara dan Feriyanto menemukan bahwa indeks pembangunan manusia memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan di Provinsi Pulau Jawa. Hal ini dikarenakan kemudahan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta kualitas pendidikan

---

<sup>14</sup> Judijanto, *Pengaruh Kebijakan Pendidikan dan Distribusi Pendapatan terhadap Ketimpangan Ekonomi di Indonesia*. Sanskara Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 2, No. 03, Juni 2024, pp. 178

dan layanan kesehatan di berbagai wilayah di Pulau Jawa, akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ketika pendidikan tersedia bagi semua orang, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan akan meningkat karena adanya pengetahuan dan kualitas dalam diri seseorang, yang pada akhirnya akan menghasilkan pendapatan yang tinggi. Lihat di bawah ini untuk data IPM di Jawa Barat dari tahun 2018 hingga 2024:



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat (2025)

**Gambar 1.2**

### **IPM Jawa Barat dan IPM Nasional dari Tahun 2018-2024**

Dari Grafik tersebut dapat dijelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Barat menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2018 hingga 2024, meningkat dari 71,3 pada 2018 menjadi 74,92 pada 2024. Meskipun secara umum IPM Jawa Barat lebih rendah dibandingkan IPM Nasional hingga 2023, pada tahun 2024 terjadi pergeseran di mana IPM Jawa Barat (74,92) hampir menyamai IPM Nasional (75,02). Selama periode ini, IPM Nasional juga terus meningkat, tetapi dengan kenaikan yang lebih stabil dibandingkan Jawa Barat. Kesenjangan IPM antara Jawa Barat dan nasional

yang cenderung menurun menunjukkan adanya perbaikan kualitas hidup di Jawa Barat yang lebih cepat dibandingkan rata-rata nasional, yang kemungkinan didorong oleh peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi di provinsi tersebut.

Era kontemporer didasarkan pada teori Keynes, yang umumnya dikenal sebagai Keynesia. Teori Keynes adalah teori ekonomi yang didasarkan pada gagasan John Maynard Keynes, ekonom Inggris abad ke-20. Teori ini mempromosikan jenis campuran ekonomi di mana suatu negara atau sektor berfokus pada isu-isu penting. Teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi makro dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mikro. Keynes menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi, terutama pada periode ini. Ia percaya bahwa kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi makro dan mengurangi tekanan deflasi.<sup>15</sup>

Secara logis, daerah dengan alokasi belanja sosial yang tinggi cenderung memiliki jaringan perlindungan sosial yang lebih kuat, sehingga mampu menahan laju ketimpangan. Program belanja sosial seperti subsidi pendidikan, jaminan kesehatan, bantuan sosial tunai, dan pemberdayaan masyarakat dapat memperkuat daya beli dan kapasitas produktif warga miskin. Oleh karena itu, besaran dan efektivitas belanja sosial sangat relevan dalam menjelaskan variasi ketimpangan antarwilayah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yasni dan Yulianto menjelaskan hubungan belanja bantuan sosial pemerintah daerah terhadap ketimpangan, menunjukkan bahwa belanja sosial berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan provinsi di Indonesia.<sup>16</sup> Sebagai upaya untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, pemerintah daerah di Jawa Barat telah melaksanakan berbagai program belanja sosial, seperti bantuan langsung tunai, subsidi

---

<sup>15</sup> Khotimah, *Dampak Keberadaan Pabrik Batu Alam Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. 2021. H. 19

<sup>16</sup> Raynal Yasni dan Heri Yulianto, 2020. *Peran belanja modal dan belanja bantuan sosial pemerintah daerah terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia*. Jurnal Substansi: Sumber Artikel Akuntansi, Auditing, dan Keuangan Vokasi, | Vol. 4 No. 1, hal 59

pendidikan, dan program kesehatan. Di Jawa Barat, belanja sosial yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir berpotensi membantu mengurangi ketimpangan, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Namun, efektivitas belanja sosial sebagai instrumen pengurang ketimpangan sangat tergantung pada efisiensi distribusi dan aksesibilitas program-program sosial bagi masyarakat miskin. Berikut di bawah ini data Belanja Sosial pemerintah Jawa Barat:

**Tabel 1.3**  
**Belanja Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat**

No	Tahun	Dana Bansos Pemprov (Rp)	Dana Bansos seluruh kab/kota (Rp)	Total (Rp)
1	2024	67.990.000.000	712.900.000.000	780.890.000.000
2	2023	144.000.000.000	866.510.000.000	1.010.510.000.000
3	2022	196,890.000.000	1.011.750.000.000	1.011.750.000.000
4	2021	742.282.000.000	683.409.000.000	1.425.691.000.000
5	2020	206.084.000.000	471.008.956.730	677.092.956.730
6	2019	277.421.000.000	415.921.031.380	693.342.031.380
7	2018	278.015.390.000	317.352.501.090	595.367.891.090

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2024 (2025)

Data yang disajikan menunjukkan tren belanja sosial pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Barat dalam kurun waktu 2018–2024, yang mencakup dana bantuan sosial (bansos) dan subsidi. Secara umum, total belanja sosial mengalami fluktuasi signifikan, dengan peningkatan tajam pada tahun 2021 mencapai Rp 1,4 triliun, yang kemungkinan besar disebabkan oleh respons pemerintah terhadap dampak sosial-ekonomi pandemi COVID-19. Pada tahun-tahun berikutnya, total belanja sosial mengalami penurunan, dengan angka tertinggi berikutnya terjadi pada 2022 sebesar Rp1,011 triliun, sebelum kembali turun pada 2024 menjadi Rp 780 Milyar.

Meskipun zakat memiliki fungsi redistributif yang kuat dalam kerangka ekonomi Islam, efektivitasnya dalam menurunkan ketimpangan ekonomi sangat

bergantung pada dukungan struktural dan kebijakan publik yang mendampingi. Dalam hal ini, belanja sosial pemerintah dapat memperkuat pengaruh zakat melalui sinergi intervensi terhadap kelompok miskin dan rentan. Jika penyaluran zakat dilakukan secara produktif dan berkelanjutan, kemudian diperkuat oleh program belanja sosial seperti subsidi pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, maka dampaknya terhadap pengurangan ketimpangan akan lebih nyata. Sebaliknya, tanpa dukungan anggaran sosial yang memadai, peran zakat bisa saja terfragmentasi dan tidak cukup kuat untuk membalikkan struktur distribusi yang timpang.

Secara teoretis, pengaruh moderasi belanja sosial dalam memperkuat fungsi redistribusi zakat sejalan dengan teori distribusi Musgrave dan Musgrave yang menyatakan bahwa fungsi distribusi negara dilakukan melalui instrumen fiskal korektif terhadap kesenjangan pasar.<sup>17</sup> Penelitian oleh Wahyudi dan Listyaningsih menunjukkan bahwa zakat memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan ketimpangan jika disertai intervensi sosial yang tepat.<sup>18</sup> Penelitian lain oleh Putri dan Nugroho membuktikan bahwa kombinasi zakat produktif dan belanja sosial di tingkat daerah memperkuat pertumbuhan inklusif.<sup>19</sup> Oleh karena itu, belanja sosial dapat bertindak sebagai variabel moderator yang menentukan apakah zakat benar-benar berfungsi optimal dalam mengatasi ketimpangan ekonomi.

Selain itu, investasi yang besar tidak selalu berujung pada penurunan ketimpangan ekonomi, terutama jika hasilnya terpusat pada kelompok tertentu atau wilayah maju saja. Dalam situasi demikian, belanja sosial pemerintah dapat menjadi alat korektif yang menjamin bahwa hasil pertumbuhan yang dihasilkan dari investasi dapat turut dinikmati oleh kelompok marjinal. Program belanja sosial seperti pelatihan kerja, beasiswa, atau subsidi produktif dapat meningkatkan kapasitas masyarakat bawah untuk berpartisipasi dalam proses ekonomi yang didorong oleh investasi. Dengan

---

<sup>17</sup> Musgrave, R. A., and Musgrave, P. B. 1989. *Public Finance in Theory and Practice*. 5th ed. New York: McGraw-Hill.

<sup>18</sup> Wahyudi, M., and Listyaningsih, L. 2021. "Optimalisasi Peran Zakat dan Belanja Sosial dalam Menurunkan Ketimpangan Ekonomi Daerah." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 7(2):123–134

<sup>19</sup> Putri, F. R., and Nugroho, H. 2020. "The Role of Zakat in Reducing Income Inequality: Empirical Evidence from Local Governments in Indonesia." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 6(2):305–328.

demikian, belanja sosial menjadi penyeimbang agar dampak investasi terhadap kesejahteraan menjadi lebih merata dan inklusif.

Secara teoretis, pendekatan *inclusive growth* menekankan pentingnya pertumbuhan yang disertai pemerataan, salah satunya melalui intervensi fiskal.<sup>20</sup> Teori pembangunan seimbang juga menegaskan bahwa ketimpangan hanya dapat dikoreksi jika investasi diarahkan pada sektor-sektor yang menyentuh lapisan bawah masyarakat. Gunawan dan Hartono dalam penelitiannya menemukan bahwa daerah yang mengalokasikan belanja sosial secara signifikan mampu meredam efek negatif dari investasi yang timpang.<sup>21</sup> Ini memperkuat asumsi bahwa pengaruh investasi terhadap ketimpangan dapat diperkuat atau dilemahkan oleh belanja sosial sebagai variabel moderator.

Selanjutnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi menandakan pembangunan manusia yang membaik, namun tidak selalu menjamin bahwa kesenjangan pendapatan akan menyempit secara otomatis. Di daerah dengan IPM tinggi tetapi struktur ekonomi yang elitis atau tidak inklusif, ketimpangan bisa tetap tinggi. Oleh karena itu, belanja sosial pemerintah berperan penting dalam memastikan bahwa peningkatan pendidikan, kesehatan, dan daya beli benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Program perlindungan sosial di bidang pendidikan dan kesehatan dapat memperkuat kontribusi IPM terhadap keadilan ekonomi, khususnya jika difokuskan pada kelompok miskin dan terencil.

Teori capabilities dari Amartya Sen menekankan bahwa peningkatan IPM harus dibarengi dengan intervensi sosial agar setiap individu mampu mengakses peluang ekonomi secara merata. Sen menyatakan bahwa *freedom to achieve well-being* sangat tergantung pada peran negara dalam menjamin akses yang setara.<sup>22</sup> Penelitian oleh Kurniawan dan Fitriani menemukan bahwa IPM memiliki hubungan negatif terhadap ketimpangan, tetapi signifikansinya

---

<sup>20</sup> Todaro, Michael P., and Stephen C. Smith. 2011. *Economic Development*. 11th ed. Boston: Addison-Wesley.

<sup>21</sup> Gunawan, R., and Hartono, D. 2022. "The Effect of Regional Investment and Social Spending on Income Inequality in Indonesia." *Jurnal Perencanaan Pembangunan Indonesia* 6(1):45–59.

<sup>22</sup> Sen, Amartya. 1999. *Development as Freedom*. New York: Alfred A. Knopf.

meningkat saat belanja sosial diperhitungkan sebagai variabel intervening atau moderator.<sup>23</sup> Hal ini menunjukkan bahwa belanja sosial memiliki peran penting dalam memperkuat kontribusi pembangunan manusia terhadap distribusi kesejahteraan yang lebih adil.

Dalam kerangka penelitian ini, belanja sosial daerah diposisikan sebagai variabel moderator yang memengaruhi kekuatan dan arah hubungan antara zakat, investasi, dan IPM terhadap ketimpangan ekonomi. Argumen logisnya adalah bahwa kebijakan sosial pemerintah memiliki kapasitas untuk memperkuat atau bahkan melemahkan dampak dari variabel-variabel pembangunan. Misalnya, zakat yang disalurkan secara produktif akan lebih optimal dampaknya ketika didukung oleh belanja sosial yang kuat dalam bentuk pelatihan kerja, subsidi pendidikan, atau perlindungan sosial. Demikian pula, dampak investasi terhadap pemerataan pendapatan sangat bergantung pada apakah kelompok miskin memiliki dukungan sosial untuk ikut terlibat dalam kegiatan ekonomi. Maka, belanja sosial bukan sekadar variabel kontrol, tetapi memiliki fungsi interaktif yang memperkaya pemahaman hubungan kausal antarvariabel dalam konteks regional.

Penempatan belanja sosial sebagai variabel moderator menjadi bagian dari novelty penelitian ini. Banyak studi sebelumnya menguji belanja sosial sebagai variabel independen terhadap ketimpangan (misalnya, Gunawan & Hartono; Adisasmita), tetapi sedikit yang menempatkannya dalam posisi interaktif untuk menilai efektivitas distribusi kekayaan secara simultan. Dengan pendekatan moderasi ini, penelitian ini menghadirkan perspektif baru tentang bagaimana kebijakan fiskal daerah berperan sebagai penguat atau penyeimbang pengaruh instrumen sosial (zakat), modal ekonomi (investasi), dan modal manusia (IPM) terhadap distribusi kesejahteraan.<sup>24</sup> Ini sejalan dengan pandangan Musgrave & Musgrave bahwa fungsi distribusi negara tidak cukup hanya hadir secara langsung, tetapi juga melalui interaksi dengan sektor-sektor pembangunan

---

<sup>23</sup> Kurniawan, A., and Fitriani, D. 2020. "Human Development Index and Social Budget: A Study on Income Disparity in West Java." *International Journal of Social Economics* 47(12):1512–1529.

<sup>24</sup> Gunawan, R. & Hartono, D. (2022). *The Effect of Regional Investment and Social Spending on Income Inequality in Indonesia*.

lainnya. Oleh karena itu, penempatan belanja sosial sebagai variabel moderator bukan hanya relevan, tetapi juga berkontribusi pada perluasan pendekatan analitis dalam studi ketimpangan berbasis nilai keislaman dan kebijakan publik daerah.

Dari latar belakang diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Realisasi Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Ketimpangan Ekonomi di Jawa Barat dengan Belanja Sosial sebagai Variabel Moderator"** didasarkan pada pentingnya memahami faktor-faktor utama yang memengaruhi tingkat ketimpangan ekonomi di Jawa Barat, meliputi instrument keuangan Islam dalam hal ini Dana Zakat di Jawa Barat, kualitas hidup masyarakat yang diukur melalui IPM, dan peran investasi dalam menggerakkan ekonomi. Selain itu, menganalisa peran belanja sosial pemerintah dalam meningkatkan efektivitas program ekonomi akan memberikan pendekatan baru dalam Pembangunan ekonomi daerah. Mengkaji faktor-faktor ini dalam konteks Jawa Barat, yang merupakan salah satu provinsi terbesar di Indonesia, memberikan wawasan penting untuk perumusan kebijakan ekonomi yang efektif.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas dan merujuk pada penelitian sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penyaluran Dana Zakat di Jawa Barat berpengaruh terhadap Gini Ratio Jawa Barat?
2. Apakah Realisasi Investasi di Jawa Barat berpengaruh terhadap Gini Ratio Jawa Barat?
3. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat berpengaruh terhadap Gini Ratio Jawa Barat?
4. Apakah Belanja Sosial Pemerintah di Provinsi Jawa Barat berpengaruh terhadap Gini Ratio Jawa Barat?
5. Apakah Belanja Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat memoderasi pengaruh antara Penyaluran Dana Zakat terhadap Gini Ratio Jawa Barat?

6. Apakah Belanja Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat memoderasi pengaruh antara Investasi terhadap Gini Ratio Jawa Barat?
7. Apakah Belanja Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat memoderasi pengaruh antara Indeks Pembangunan Manusia terhadap Gini Ratio Jawa Barat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh Penyaluran Dana Zakat di Jawa Barat terhadap Gini Ratio Jawa Barat
2. Menguji dan menganalisis pengaruh Realisasi Investasi di Jawa Barat terhadap Gini Ratio Jawa Barat
3. Menguji dan menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat terhadap Gini Ratio Jawa Barat
4. Menguji dan menganalisis pengaruh Belanja Sosial Pemerintah di Provinsi Jawa Barat terhadap Gini Ratio Jawa Barat
5. Menguji dan menganalisis pengaruh Belanja Sosial Pemerintah di Provinsi Jawa Barat dalam memoderasi antara Penyaluran Dana Zakat terhadap Gini Ratio Jawa Barat
6. Menguji dan menganalisis pengaruh Belanja Sosial Pemerintah di Provinsi Jawa Barat dalam memoderasi antara Investasi terhadap Gini Ratio Jawa Barat
7. Menguji dan menganalisis pengaruh Belanja Sosial Pemerintah di Provinsi Jawa Barat dalam memoderasi antara Indeks Pembangunan Manusia terhadap Gini Ratio Jawa Barat

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Berdasarkan tujuan di atas, kegunaan yang akan diperoleh dengan adanya penelitian sebagai berikut:

## **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi kemajuan ilmu pengetahuan, acuan bagi kemajuan teknologi bagi pembangunan ekonomi, dan sumbangan positif bagi kajian ekonomi Islam, khususnya penelitian tentang perluasan perekonomian di Jawa Barat, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

## **2. Secara Praktis**

### **a. Bagi Pemerintah**

Memberikan tambahan dan masukan kepada pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), khususnya dalam merumuskan kebijakan belanja sosial yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti. Temuan empiris terkait hubungan zakat, investasi, IPM, dan belanja sosial terhadap ketimpangan dapat menjadi dasar untuk menyusun program pembangunan yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan wilayah dengan tingkat kesenjangan yang tinggi.

### **b. Bagi Lembaga Zakat**

Mengembangkan strategi penyaluran zakat yang terarah dan berdampak sistemik. Dengan adanya bukti empiris bahwa belanja sosial dapat memoderasi efektivitas zakat dalam menurunkan ketimpangan, maka sinergi antara zakat dan program-program pemerintah bisa diperkuat. Hal ini akan memperkuat peran zakat bukan hanya sebagai instrumen spiritual, tetapi juga sebagai alat keadilan sosial yang terintegrasi dalam sistem fiskal lokal.

### **c. Bagi Akademisi dan Peneliti selanjutnya**

Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini menyediakan model analisis empiris berbasis data panel moderasi yang dapat direplikasi atau dikembangkan lebih lanjut dalam konteks daerah lain atau dengan variabel tambahan. Ini membuka ruang kontribusi praktis dari dunia akademik terhadap penyusunan kebijakan publik yang berbasis data dan nilai-nilai keislaman.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini berangkat dari kerangka teoritis yang memadukan perspektif pembangunan ekonomi syariah dan ekonomi makro Islam dengan teori-teori turunan yang relevan. Penelitian ini menggunakan *Grand Theory* berupa Teori Ekonomi Pembangunan Syariah yang menempatkan keadilan distributif dan pencapaian maqasid al-shariah sebagai tujuan utama pembangunan. Dalam perspektif ini, pembangunan tidak semata diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari pemerataan distribusi pendapatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan terwujudnya kesejahteraan yang berkelanjutan.

Selanjutnya, digunakan Teori Ekonomi Makro dalam Islam yang menjelaskan hubungan antarvariabel agregat ekonomidalam kerangka kebijakan fiskal dan moneter berbasis syariah. Teori ini memberikan penjelasan bagaimana instrumen ekonomi Islam dapat digunakan untuk menstabilkan perekonomian sekaligus mengurangi ketimpangan melalui distribusi kekayaan yang adil, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kapasitas manusia.

Selanjutnya adalah Applied Theory, yaitu teori-teori yang secara langsung berkaitan dengan variabel penelitian. Teori zakat menjelaskan peran zakat sebagai instrumen distribusi pendapatan dan pengentasan kemiskinan; teori investasi menekankan peran penanaman modal dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan; teori human capital menjelaskan bagaimana peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat memperkecil kesenjangan; dan teori belanja sosial menggambarkan peran pengeluaran pemerintah atau lembaga sosial dalam menyeimbangkan distribusi pendapatan masyarakat.

Keterkaitan antar lapisan teori ini membentuk alur logis penelitian: Teori Ekonomi Pembangunan Syariah menjadi kerangka besar yang memayungi konsep kebijakan makro ekonomi Islam, yang kemudian diterjemahkan ke dalam teori-teori spesifik yang menjelaskan hubungan masing-masing variabel terhadap ketimpangan ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini memposisikan variabel zakat, investasi, IPM, dan belanja sosial dalam satu model analisis yang terintegrasi secara konseptual dan empiris.

Dengan demikian, berikut diuraikan kerangka pemikiran mulai dari nilai-nilai fundamental yang menjadi landasan normatif, mekanisme hubungan antarvariabel pada tataran makro, hingga penerapan teori yang relevan dengan variabel penelitian, antarlain:

### **1. Ketimpangan Ekonomi**

Ketimpangan pendapatan merupakan isu sentral dalam kajian ekonomi pembangunan. Secara teoritis, ketimpangan merujuk pada perbedaan dalam distribusi pendapatan atau kekayaan antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Teori klasik seperti Kuznets Hypothesis menyatakan bahwa ketimpangan cenderung meningkat pada tahap awal pertumbuhan ekonomi dan menurun seiring dengan berkembangnya industrialisasi dan pembangunan institusi sosial.<sup>25</sup> Namun, dalam kenyataannya, banyak negara berkembang justru mengalami ketimpangan yang semakin melebar meskipun pertumbuhan ekonomi terus terjadi, menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak selalu bersifat inklusif.

Secara logika, ketimpangan pendapatan memicu distorsi sosial dan ekonomi, antara lain rendahnya mobilitas sosial, melemahnya konsumsi agregat, dan timbulnya ketidakstabilan politik. Joseph Stiglitz menyatakan bahwa ketimpangan yang berlebihan bukan hanya tidak adil, tetapi juga merusak efisiensi ekonomi karena menghambat akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi.<sup>26</sup> Dalam jangka panjang, situasi ini mengarah pada lingkaran setan kemiskinan dan pembelahan sosial, di mana kelompok kaya makin dominan dan kelompok miskin makin terpinggirkan.

Studi empiris dari Ostry yang menggunakan data dari IMF menunjukkan bahwa ketimpangan yang tinggi memiliki korelasi negatif terhadap pertumbuhan jangka panjang. Negara-negara dengan distribusi pendapatan yang lebih merata cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Selain itu, ketimpangan juga menghambat pengentasan

---

<sup>25</sup> Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. *The American Economic Review*, 45(1), 1–28.

<sup>26</sup> Stiglitz, J. E. (2012). *The price of inequality: How today's divided society endangers our future*. W. W. Norton & Company.

kemiskinan karena pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh kelompok elit, tanpa mengangkat kesejahteraan masyarakat bawah.<sup>27</sup>

Dalam konteks Indonesia, ketimpangan masih menjadi tantangan serius. Data dari BPS menunjukkan bahwa Gini Ratio nasional berkisar di angka 0,38–0,40 dalam dekade terakhir, yang termasuk tinggi dibanding standar negara berkembang. Ketimpangan juga bersifat multidimensi—meliputi dimensi spasial (desa-kota), sektoral (formal-informal), hingga akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Ketimpangan yang kronis ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dinikmati secara adil di seluruh wilayah dan lapisan masyarakat.

Ketimpangan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga mencerminkan kegagalan distribusi kekuasaan, akses, dan peluang. Oleh karena itu, kebijakan publik memainkan peran krusial dalam menciptakan sistem yang lebih adil. Pendekatan redistributif seperti pajak progresif, transfer sosial, dan instrumen berbasis keagamaan seperti zakat, perlu diintegrasikan dalam strategi pembangunan. Teori distribusi Musgrave menekankan bahwa fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dari negara harus dijalankan bersamaan untuk memastikan bahwa pertumbuhan membawa pemerataan.<sup>28</sup>

Beberapa studi di Indonesia menunjukkan bahwa intervensi pemerintah melalui belanja sosial, serta instrumen non-negara seperti zakat, berkontribusi terhadap pengurangan ketimpangan. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada desain kebijakan, akurasi sasaran, dan kesinambungan program. Dengan memahami berbagai faktor yang mempengaruhi ketimpangan—baik dari sisi institusional, sosial, maupun ekonomi—diharapkan pendekatan yang holistik dan berbasis bukti dapat dikembangkan untuk menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

---

<sup>27</sup> Ostry, J. D., Berg, A., & Tsangarides, C. G. (2014). Redistribution, inequality, and growth. IMF Staff Discussion Note SDN/14/02. International Monetary Fund.  
<https://doi.org/10.5089/9781484352076.006>

<sup>28</sup> Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public finance in theory and practice* (5th ed.). McGraw-Hill Book Company.

## 2. Pengaruh Dana Zakat terhadap Ketimpangan Ekonomi

Dana zakat memiliki peran strategis sebagai alat redistribusi ekonomi dalam Islam yang memberikan pengaruh langsung terhadap penurunan ketimpangan ekonomi. Dengan menyalurkan zakat dari muzakki kepada mustahik, terjadi transfer sumber daya dari kelompok berpendapatan tinggi ke kelompok berpendapatan rendah. Skema ini berfungsi efektif dalam menekan kesenjangan karena sasaran zakat adalah kelompok paling rentan secara ekonomi.<sup>29</sup>

Secara teori, zakat memperkuat daya beli masyarakat bawah dan mendorong partisipasi ekonomi yang lebih luas, sehingga menciptakan pemerataan kesejahteraan. Dalam konteks kebijakan fiskal sosial, zakat mendukung prinsip keadilan distributif melalui instrumen yang berbasis nilai keagamaan dan komitmen kolektif. Zakat juga memberikan stimulus konsumsi produktif yang berpotensi menggerakkan ekonomi mikro secara berkelanjutan.<sup>30</sup>

Penelitian Ayuniyyah dan Abdelbaki memperkuat bukti bahwa distribusi zakat secara sistematis mampu menurunkan indeks ketimpangan di beberapa negara dengan basis zakat yang kuat.<sup>31</sup> Di Indonesia, kontribusi zakat juga menjadi semakin signifikan seiring meningkatnya kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat berfungsi sebagai kekuatan fiskal non-negara yang selaras dengan tujuan pembangunan inklusif.<sup>32</sup>

## 3. Pengaruh Investasi terhadap Ketimpangan Ekonomi

Investasi memiliki kapasitas untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan pendapatan, dan penguatan struktur ekonomi daerah yang pada akhirnya menurunkan ketimpangan ekonomi. Investasi yang diarahkan pada

---

<sup>29</sup> Scott, James C. 2010. *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. New Haven: Yale University Press.

<sup>30</sup> Jehle, Geoffrey A., and Philip J. Reny. 1994. *Advanced Microeconomic Theory*. New York: Addison-Wesley.

<sup>31</sup> Ayuniyyah, Qonita, Syamsuri, dan Nasim. 2022. "Zakat Distribution and Its Impact on Income Inequality in Indonesia." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 8(2):247–72.

<sup>32</sup> Abdelbaki, H. H. 2013. "The Impact of Zakat on Poverty and Income Inequality in Bahrain." *Review of Integrative Business and Economics Research* 2(1):133–54.

sektor-sektor padat karya atau infrastruktur dasar berperan penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap sumber penghidupan produktif.<sup>33</sup> Aktivitas investasi juga meningkatkan permintaan tenaga kerja lokal yang berdampak langsung pada distribusi pendapatan yang lebih merata.

Secara teoritis, investasi memperluas basis produksi dan menciptakan keseimbangan pertumbuhan antarwilayah melalui transmisi pembangunan fisik dan ekonomi. Ketika investasi teralokasi ke daerah tertinggal atau dengan kapasitas produksi rendah, maka peluang ekonomi lokal akan meningkat secara signifikan. Hal ini memberikan dampak nyata pada penyempitan jurang antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah.

Studi Ishak dan Prannisa menunjukkan bahwa peningkatan investasi daerah berdampak positif terhadap penurunan indeks ketimpangan di wilayah-wilayah pengamatan.<sup>34</sup> Investasi publik dan swasta yang digerakkan secara sinergis membangun konektivitas dan produktivitas wilayah sehingga mempercepat pemerataan pembangunan.<sup>35</sup> Fakta ini menegaskan bahwa investasi merupakan salah satu variabel utama dalam strategi pengurangan ketimpangan ekonomi di daerah.

#### **4. Pengaruh IPM terhadap Ketimpangan Ekonomi**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencerminkan kualitas sumber daya manusia dari aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli yang seluruhnya berkaitan langsung dengan struktur ketimpangan ekonomi. Ketika IPM meningkat, maka individu memiliki kapasitas yang lebih baik untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi yang produktif. Peningkatan kualitas

---

<sup>33</sup> Borensztein, Eduardo, José De Gregorio, and Jong-Wha Lee. 1998. "How Does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth?" *Journal of International Economics* 45(1):115–35.

<sup>34</sup> Ishak, Nurfadilah, Dian Novita, dan Putu Ayu. 2018. "Investment, Employment and Income Inequality in Indonesia." *International Journal of Economics and Financial Issues* 8(6):100–107.

<sup>35</sup> Prannisa, Salsabila, Ika Yunita, dan Rendra Saputra. 2023. "The Role of Regional Investment in Reducing Income Inequality in Indonesia." *International Journal of Economic Policy in Emerging Economies* 16(1):57–71.

pendidikan dan kesehatan memperbesar kemungkinan memperoleh pendapatan lebih tinggi dan mendorong mobilitas sosial vertikal.<sup>36</sup>

Secara konseptual, peningkatan IPM menghasilkan struktur sosial yang lebih adil karena memperluas akses terhadap sumber daya ekonomi. Investasi pada pendidikan dan kesehatan telah terbukti memberikan dampak jangka panjang terhadap pencapaian kesejahteraan dan distribusi pendapatan yang lebih seimbang. Dengan kata lain, IPM yang tinggi berkontribusi langsung terhadap berkurangnya ketimpangan ekonomi.

Penelitian Pramaditya memberikan bukti kuat bahwa pertumbuhan IPM di berbagai wilayah Indonesia berkorelasi positif dengan penurunan ketimpangan.<sup>37</sup> Hal ini semakin memperkuat keyakinan bahwa upaya peningkatan IPM tidak hanya berfungsi sebagai indikator pembangunan, tetapi juga sebagai alat pemerataan ekonomi. Oleh karena itu, IPM merupakan variabel krusial dalam menjelaskan arah pergerakan ketimpangan ekonomi regional.

## **5. Pengaruh Belanja Sosial terhadap Ketimpangan Ekonomi**

Belanja sosial pemerintah, yang meliputi subsidi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan bantuan sosial lainnya, merupakan alat fiskal yang sangat efektif dalam memperbaiki distribusi pendapatan. Alokasi belanja sosial kepada kelompok masyarakat rentan memperbesar kemampuan mereka mengakses layanan dasar yang meningkatkan kualitas hidup. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan dan penurunan ketimpangan.<sup>38</sup>

Belanja sosial juga mendorong pemerataan kesempatan ekonomi dengan menciptakan jaring pengaman sosial yang memperkuat posisi ekonomi kelompok berpendapatan rendah. Ketika belanja sosial dilakukan secara terarah, maka efeknya tidak hanya meningkatkan konsumsi masyarakat miskin,

---

<sup>36</sup> Asian Development Bank (ADB). 2011. *Asia 2050: Realizing the Asian Century*. Manila: ADB.

<sup>37</sup> Pramaditya, Ragil, Endah Ratna Wati, dan Andhika Wijayanto. 2024. "Pengaruh IPM terhadap Ketimpangan Ekonomi di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 24(1):75–88.

<sup>38</sup> Benos, Nikos dan Stelios Karagiannis. 2016. "Do Education and Health Expenditures Reduce Income Inequality? Evidence from OECD Countries." *Social Indicators Research* 127(3):1239–63.

tetapi juga memperkuat partisipasi mereka dalam aktivitas produktif. Dengan demikian, belanja sosial memperkuat struktur ekonomi yang lebih inklusif.

Empiris, Ulu dan Herdiyati menunjukkan bahwa peningkatan alokasi belanja sosial di tingkat regional secara nyata berdampak pada penurunan tingkat ketimpangan pendapatan.<sup>39</sup> Ini menunjukkan bahwa belanja sosial memiliki efek langsung sekaligus berperan sebagai pengungkit untuk memperkuat kebijakan lain yang mendukung pemerataan.<sup>40</sup> Oleh karena itu, belanja sosial berfungsi sebagai variabel strategis dalam mendorong transformasi sosial-ekonomi yang lebih adil.

## **6. Moderasi Belanja Sosial terhadap Pengaruh Zakat terhadap Ketimpangan**

Peran belanja sosial dalam memoderasi hubungan antara zakat dan ketimpangan ekonomi memperkuat pengaruh positif zakat terhadap pemerataan ekonomi. Kombinasi ini menciptakan efek sinergis yang memperluas cakupan dampak dari distribusi zakat melalui intervensi sistemik pemerintah. Dengan dukungan belanja sosial, bantuan zakat menjadi lebih terintegrasi ke dalam sistem pelayanan publik yang meningkatkan kapabilitas penerima.<sup>41</sup>

Secara teoritis, zakat sebagai transfer individu diperkuat oleh belanja sosial yang bersifat struktural dan kolektif. Ketika pemerintah menyediakan infrastruktur sosial, maka hasil distribusi zakat lebih mudah terakselerasi karena penerima memiliki ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonominya. Belanja sosial berperan memperluas dampak zakat dari jangka pendek menjadi berkelanjutan.

Penelitian Ayuniyyah dan Arsyad memperlihatkan bahwa integrasi antara zakat dan belanja sosial menghasilkan dampak yang lebih luas terhadap penurunan ketimpangan. Hal ini membuktikan bahwa belanja sosial tidak hanya

---

<sup>39</sup> Ulu, Meryem. 2018. "Public Social Expenditures and Income Inequality: Evidence from Turkey." *The European Journal of Comparative Economics* 15(2):275–94.

<sup>40</sup> Herdiyati, Siti. 2022. "Analisis Belanja Sosial terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan* 22(1):15–29.

<sup>41</sup> Indonesia Development Outlook. 2017. *Menuju Pembangunan Inklusif dan Berkeadilan: Strategi Ekonomi untuk Pemerataan*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

memiliki pengaruh langsung, tetapi juga memperkuat efektivitas variabel-variabel sosial lainnya seperti zakat.<sup>42</sup> Oleh karena itu, dalam penelitian ini belanja sosial diasumsikan berperan sebagai moderator yang memperbesar efek positif zakat terhadap ketimpangan.

## **7. Moderasi Belanja Sosial terhadap Pengaruh Investasi terhadap Ketimpangan**

Belanja sosial memiliki peran penting dalam memperkuat dampak positif investasi terhadap ketimpangan ekonomi. Ketika investasi digerakkan bersamaan dengan belanja sosial, maka akses masyarakat miskin terhadap hasil investasi menjadi lebih terbuka dan efektif. Kombinasi ini menciptakan pemerataan kesempatan dan hasil pembangunan.<sup>43</sup>

Dalam perspektif kebijakan publik, belanja sosial menyediakan fondasi bagi masyarakat miskin untuk mengambil manfaat dari proses investasi melalui peningkatan keterampilan, kesehatan, dan produktivitas. Maka dari itu, kehadiran belanja sosial meningkatkan daya tangkap masyarakat terhadap peluang ekonomi yang muncul akibat investasi. Hal ini menghasilkan distribusi pendapatan yang semakin merata.

Temuan Prannisa mendukung pandangan ini, di mana efek positif investasi terhadap ketimpangan menjadi lebih kuat ketika diiringi peningkatan belanja sosial. Interaksi antara kedua variabel tersebut menciptakan efisiensi pembangunan dan memperbesar efek sosial ekonomi dari alokasi investasi.<sup>44</sup> Maka dari itu, moderasi belanja sosial terhadap investasi merupakan strategi efektif dalam upaya menurunkan ketimpangan ekonomi daerah.

---

<sup>42</sup> Ayuniyyah, Qonita, Syamsuri, dan Nasim. 2022. "Zakat Distribution and Its Impact on Income Inequality in Indonesia." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 8(2):247–72.

<sup>43</sup> Herdiyati, Siti. 2022. "Analisis Belanja Sosial terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan* 22(1):15–29.

<sup>44</sup> Prannisa, Salsabila, Ika Yunita, dan Rendra Saputra. 2023. "The Role of Regional Investment in Reducing Income Inequality in Indonesia." *International Journal of Economic Policy in Emerging Economies* 16(1):57–71.

## **8. Moderasi Belanja Sosial terhadap Pengaruh IPM terhadap Ketimpangan**

Belanja sosial memainkan peran penting dalam mengoptimalkan pengaruh IPM terhadap penurunan ketimpangan ekonomi. Dukungan belanja sosial pada sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial mempercepat peningkatan IPM yang berdampak pada kualitas hidup dan kapasitas ekonomi masyarakat. Ketika belanja sosial disinergikan dengan upaya peningkatan IPM, maka hasilnya lebih komprehensif dalam menciptakan pemerataan pembangunan.<sup>45</sup>

Dalam konteks pembangunan daerah, alokasi belanja sosial yang diarahkan untuk memperkuat komponen IPM menghasilkan masyarakat yang lebih produktif dan mandiri. Kualitas manusia yang meningkat, ditunjang oleh layanan sosial yang terjangkau, memperbesar peluang ekonomi dan mengurangi ketimpangan pendapatan secara progresif. Hal ini memperkuat korelasi antara peningkatan IPM dan pemerataan ekonomi di berbagai wilayah.

Penelitian Pramaditya dan data IPM kabupaten/kota di Jawa Barat mendukung argumen bahwa daerah dengan belanja sosial yang kuat cenderung menunjukkan pengaruh IPM yang lebih besar terhadap ketimpangan.<sup>46</sup> Oleh karena itu, dalam kerangka pemikiran ini, belanja sosial diposisikan sebagai moderator yang memperkuat pengaruh IPM terhadap penurunan ketimpangan secara signifikan.

### **F. Hipotesis**

Dari pokok permasalahan yang telah diuraikan dan kerangka pemikiran teoritis, maka hipotesis yang dapat dikemukakan pada penelitian ini yaitu “diduga bahwa *Zakat*, Investasi, Indeks Pembangunan Manusia dan Belanja Sosial Pemerintah memiliki berpengaruh terhadap Ketimpangan Ekonomi dan variabel Belanja Sosial

---

<sup>45</sup> Tselios, Vassilis, André Ramos, José A. Martínez-López, and Jordi Pons-Novell. 2012. “Inequality and Human Development Across European Regions.” *Journal of Socio-Economics* 41(5):558–69.

<sup>46</sup> Pramaditya, Ragil, Endah Ratna Wati, dan Andhika Wijayanto. 2024. “Pengaruh IPM terhadap Ketimpangan Ekonomi di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 24(1):75–88.

memiliki pengaruh terhadap hubungan *Zakat*, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap Ketimpangan Ekonomi.”

Hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: Dana *Zakat* berpengaruh terhadap Ketimpangan Ekonomi.

H2: Investasi berpengaruh terhadap Ketimpangan Ekonomi.

H3: Indeks Pemangunan Manusia berpengaruh terhadap Ketimpangan Ekonomi.

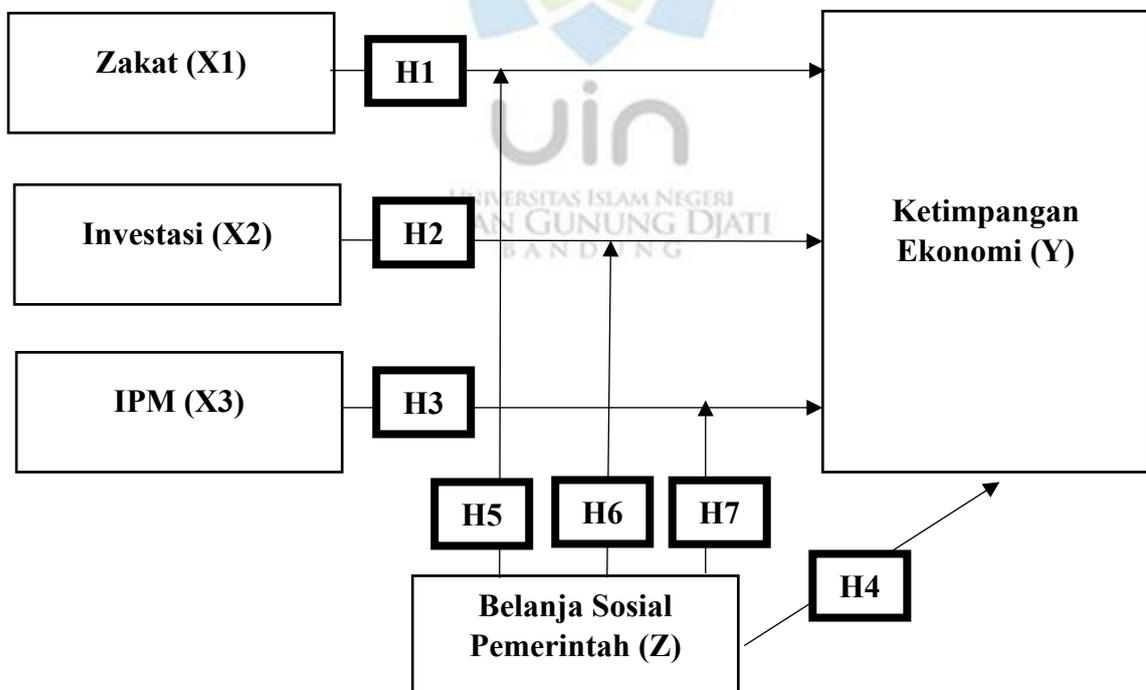
H4: Belanja Sosial memiliki pengaruh terhadap Ketimpangan Ekonomi.

H5: Belanja Sosial memiliki pengaruh terhadap hubungan antara *Zakat* terhadap Ketimpangan Ekonomi.

H6: Belanja Sosial memiliki pengaruh terhadap hubungan antara Investasi terhadap Ketimpangan Ekonomi

H7: Belanja Sosial memiliki pengaruh terhadap hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Ekonomi.

Adapun ilustrasi kerangka pikir dalam Hipotesis ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1.3

**Kerangka Pemikiran Penelitian**